**E-Government dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara**

**Angga Oktapriono1, Cris Kuntadi2, R. Luki Karunia3**

1. Politeknik STIA LAN, Jakarta, okta\_angga@rocketmail.com
2. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id
3. Politeknik STIA LAN, Jakarta, luki@stialan.ac.id

Corresponding Author: Angga Oktapriono

Abstrak :

Artikel ini merupakan *Literature Review* untuk mengetahui pengaruh penggunaan *E-Government* terhadap pengelolaan keuangan negara. Artikel ini memperlihatkan bagaimana *E-Government* dalam hal ini penerapan *E-Budgeting*, Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) mempengaruhi pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci : *E-Government*, SAKTI, SPAN, *E-Budgeting*, Pengelolaan Keuangan Negara

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Salah satu parameter pemerintahan dapat dikatakan baik yaitu memiliki *good governance* yang baik, yaitu pemerintahan yang mengutamakan transparansi, akuntanbilitas, efektifivitas, efisiensi, serta anti nepotisme, anti korupsi, anti kolusi, Indonesia merupakan negara dengan luas yang besar, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah masih menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, diperlukan jaringan internet agar memudahkan komunikasi antar daerah secara cepat dan transparan.

Ada beberapa prinsip *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), 1997, yaitu:

1. Partisipasi;
2. Kepastian hukum;
3. Transparansi;
4. Tanggung jawab;
5. Berorientasi pada kesepakatan;
6. Keadilan;
7. Efektifitas dan efesiensi;
8. Akuntabilitas;
9. Visi strategik.

Prinsip-prinsip tersebut melekat pada pemerintahan untuk mencapai apa yang diharapkan oleh publik sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat dirasakan.

Dalam mencapai prinsip-prinsip tersebut, tentu saja diperlukan akses informasi yang baik. Untuk memudahkan akses informasi antar pemerintah pusat dan dari pemerintah pusat ke daerah maka diperlukan fasilitas internet dan berbagai aplikasi yang dapat memudahkan tugas dan fungsi. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan *e-government* yang memberikan kemudahan akses sehingga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Walaupun belum seluruh pelayanan publik dapat sepenuhnya dilakukan melalui *e-government* melalui sistem yang tersedia, tetapi pada keadaannya selama ini banyak pelayanan publik yang disediakan melalui elektronik.

*E-Government* merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interakif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. *e-government* yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud transparansi dalam pelayanan publik (Nur, 2014).

Menurut Kuntadi, C. & Dwiasri, D.F. (2022), Pemanfaatan teknologi informasi dalam *e-government* mencakup 2 aktivitas, yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Menurut Kuntadi, C. & Dwiasri, D.F. (2022), pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 tujuan :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas; terjangkau dari sisi wilayah dan biaya;

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;

3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan Lembaga-Lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara;

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Penerapan *e-government* tidak hanya terbatas dalam pelayanan masyarakat saja, tetapi juga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) juga digunakan *e-government.* Hal tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan transparansi, akuntanbilitas, efektifivitas, efisiensi sektor keuangan pemerintahan.

Dibentuknya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memberikan bukti bahwa pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sistem yang bersih dan bebas dari korupsi terutama pada penggunaan anggaran yang sangat penting untuk diawasi. Penerapan teknologi yang sejalan dengan aturan pemerintah akan menciptakan peningkatan produktivitas dan pelayanan publik untuk masyarakat dan juga didalam pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya kemajuan teknologi juga diharapkan kepercayaan dan transparansi pelayanan publik semakin meningkat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan APBN/APBD adalah melalui Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut, pemerintah melalui menerapan e-government telah menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD. Dalam pengelolaan keuangan negara tersebut ada beberapa aplikasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, antara lain e-budgeting, Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Aplikasi tersebut merupakan salah perwujudan dari *e-government* dalam bentuk G to G (*government to government*), yaitu untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi *online* antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi.

Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut tentu saja menjadi pertanyaan, apakah aplikasi mahal yang telah dibuat yaitu *e-budgeting*, SAKTI, dan SPAN dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan negara.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh aplikasi *e-budgeting* terhadap pengelolaan keuangan negara?
2. Bagaimana pengaruh aplikasi SAKTI terhadap pengelolaan keuangan negara?
3. Bagaimana pengaruh aplikasi SPAN terhadap pengelolaan keuangan negara?

**KAJIAN TEORI**

1. E-Government

Menurut Wibawa (2009), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks* (WAN) internet, *moble competing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan pemerintah kepada publik agar terjalin hubungan yang baik oleh kedua pihak.

*E-government* diperkenalkan sebagai sebuah konsep baru dalam penyelenggaraan birokrasi layanan publik mengikuti perkembangan masyarakat informasi (Wicaksono, 2018). Bank Dunia (The World Bank Group, 2013) mendefinisikan e-goverment sebagai “Upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada public secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat” (Aminudin & Putra, 2014). Egovernment digunakan dalam pelayanan public dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dalam bentuk penyampaian informasi (Juliarso, 2019).

E-government menjadi salah satu cara dalam pemanfaatan teknologi dan informasi

dalam menyediakan pelayanan publik secara maksimal dan lebih baik untuk masyarakat. Egovernment dikembangkan dengan dilaksanakannya penataan sistem manajemen dan kinerja di lingkungan birokrasi, caranya yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi (TEŞU, 2012). Penggunaan teknologi dan informasi mencakup dalam dua hal yaitu pada waktu pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, pada waktu proses kerja elektronis dan pada saat menggunakan elektronik dalam proses pelayanan publik dengan tujuan memudahkan masyarakat (Wicaksono, 2018).

Informasi yang terbuka dan kelengkapan pada *e-government* akan mendorong terciptanya good governance pada pemerintah dan dapat meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pada lembaga atau kantor penyedia layanan publik (Juliarso, 2019). Penggunaan *e-government* diharapkan dapat menciptakan berbagai layanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak lain (Handiwidjojo & Oetomo, 2009). Manfaat *e-government* dapat meningkatkan efisiensi di lembaga pemerintah dan tentunya memberikan manfaat dapat meningkatkan pelayanan publik dan membantu dalam pencapaian hasil kinerja atau kebijakan tertentu dan dapat membangun kepercayaan masayarakat kepada pemerintah (Aminudin & Putra, 2014). E-government memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Sufianti, 2007).

Harapannya, *e-government* dapat membuat peningkatan produktivitas serta efisiensi pada birokrasi pemerintah dan mengakibatkan meningkatnya kreatifitas serta inovasi dari penyelenggara pelayanan publik (Juliarso, 2019).

1. *E-Budgeting*

Tujuan penerapan *e-budgeting* adalah untuk meningkatkan akurasi data, menyederhanakan penganggaran, membuat data lebih transparani dan sulit untuk dipalsukan, menyusun RKA lebih mudah, menghasilkan laporan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan lainnya. Oleh sebab itu, *e-budgeting* diyakini dapat mengurangi atau mencegah seseorang untuk melakukan tindak korupsi (Rahma, A.N. & Rani, U, 2022).

Loina (2003) menjelaskan bahwa terhadap beberapa tahapan sebuah program, akuntabilitas mulai dari proses pembuatan sebuah keputusan dan sosialisasi kebijakan. Dari prinsip akuntabilitas, adanya sebagai sebuah media penyampaian dan penyalur informasi selama penganggaran dengan melalui penganggaran elektronik (*e-budgeting*) yang bisa diakses seluruh pihak dimungkinkan dapat memenuhi kriteria akuntabilitas. Dengan demikian, adanya penganggaran elektronik penting untuk diperhatikan karena berpotensi mendorong akuntabilitas pemerintah. Peningkatan akuntabilitas organisasi berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pemanfaatan *e-budgeting* di pemerintah daerah dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sisem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik berubah menjadi sistem kepemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom (Sosiawan dalam Rohma, 2023). Pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi dengan cara mengunggah dokumen publik kepada masyarakat melalui situs web ataupun jaringan yang diketahui oleh khalayak umum agar kedua belah pihak (pihak agen dan prinsipal) dapat memberikan feedback ataupun memperoleh manfaat atas informasi yang tersedia. Pemerintah daerah yang diberikan tanggungjawab oleh masyarakat untuk mengelola aset daerah seyogyanya dapat melaksanakan dan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sebagai media untuk melaksanakan transparansi. Penganggaran merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang membutuhkan umpan balik dan transparansi dalam pelaksanaannya. Indrajit dalam Rohma (2023) menjelaskan bahwa salah satu kriteria transparansi yang dapat dijadikan panduan adalah banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan seperti keterbukaan anggaran.

1. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI merupakan perwujudan dari sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI berperan sebagai *mirroring* Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada level satuan kerja (satker). SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI menerapkan konsep *singel database*. SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan seluruh Kementrian Negara/Lembaga.

Perbedaan SAKTI dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. SAKTI menggunakan satu database yang terpusat dan sama (*single database*);

2. SAKTI memiliki keamanan yang lebih tinggi dengan adanya proses enkripsi/dekripsi arsip data komputer;

3. SAKTI dapat diinstall pada beberapa sistem oprasi komputer;

4. SAKTI lebih mudah digunakan; dan

5. SAKTI memiliki kinerja aplikasi yang konsisten (Sutiono & Taufiqurahman, 2020).

Implementasi SAKTI, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015, nomor 131/PMK.05/2016, dan 171/PMK.05/2021 diawali dengan tahapan uji coba terbatas (*piloting*) mulai tahun 2015. Dalam tahap piloting awal, masih ditemukanbeberapa permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI. Sebagai contoh, masih terjadi gangguan konektivitas jaringan, masih terdapat celah kesalahan imput data, masih terdapat bug yang menyebabkan aplikasi *error*, kurang lengkapnya fitur yang disediakan, kurang lengkapnya data *output* yang dihasilkan, *user interface* dan *user experience* yang kurang nyaman, penggunaan istilah asing yang sulit dipahami pengguna baru, hingga kurang efektifnya layanan dukungan dari tim pendamping *piloting*. SAKTI merupakan proyek berskala nasional yang menghabiskan biaya, waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Namun, besarnya pengorbanan yang dikeluarkan tersebut nyatanya belum tentu menjamin keberhasilan implementasinya (Pambudi & Adam, 2018).

1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan (PMK No. 154/PMK.05/2014, 2014).

Sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan (PMK No. 171/PMK.05/2021, 2021). Dalam aplikasi SPAN juga terdiri atas modul-modul (menu) seperti halnya aplikasi SAKTI, yaitu modul penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas dan modul akuntansi dan pelaporan atau modul general ledger dan pelaporan (GLP).

Modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) SPAN Modul GLP SPAN merupakan inti dari sistem pengelolaan keuangan negara yangterintegrasi. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi keuangan yang di-*input* ke dalam sistem akan di-*posting* seluruhnya ke dalam modul GLP, sehingga modul GLP merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pada SPAN, modul GLP juga menerapkan dua *general ledger*, yaitu *general ledger* akrual dan *general ledger* kas untuk mengakomodir penerapan penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi akrual.

Terkait penyusunan laporan keuangan, pada Modul GLP juga dapat dilakukan pembuatan jurnal manual dan jurnal pembalik serta melihat informasi jurnal dan informasi perkiraan atas akun yang sudah tercatat dalam *general ledger*. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan, operator Modul GLP hanya perlu membuat permintaan pada sistem aplikasi SPAN untuk memperoleh berbagai laporan keuangan yang diinginkan. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan oleh Modul GLP pada SPAN yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

1. Keuangan Negara

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, san badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (Amtiran, P.Y. & Molidya, A, 2020).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Author (tahun) | Hasil Riset | Persamaan Dengan Artikel Ini | Perbedaan Dengan Artikel Ini |
| 1 | Frida Fanani Rohma (2023) | Urgensi Implementasi Pengganggaran Elektronik (*e-budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan | Pengaruh *e-budgeting* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan | - |
| 2 | Rahma, A.N. & Rani, U. (2023) | Peran e*-budgeting* Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta | Pengaruh *e-budgeting* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan | - |
| 3 | Lestari, N. & Purnawati, I. (2022) | Analisis Implementasi *e-budgeting* Menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di SKPD Kabupaten Karangasem | Sistem *e-budgeting* dapat mempermudah dan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan | - |
| 4 | Gultom, C. & Harahap, S. (2024) | Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan LaporanKeuangan Satuan Kerja Pemerintah | Pengaruh SAKTI terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah | - |
| 5 | Adelia MB, Armay & Astuti, C. (2024) | Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Kompetensi SumberDaya Manusia Aparatur, Dan Sistem Pengendalian Intern PemerintahTerhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | Pengaruh SAKTI terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | Pengaruh komptensi SDM Aparatur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah |
| 6 | Rinna, dkk. (2024) | Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Terhadap Efektivitas, Kinerja Pengguna Dan Dampak Pada Kualitas Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak Indonesia Timur | Pengaruh SAKTI terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | - |
| 7 | Anwar, A. & Hadi, M. (2022) | Implementasi Aplikasi SAKTI dan SPANDalam Penyusunan Laporan Keuangan | Pengaruh Aplikasi SAKTI dan SPANDalam Penyusunan Laporan Keuangan | - |
| 8 | Tarigan, dkk. (2022) | Penerapan SPAN Pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pematangsiantar | - | Pengaruh SPAN terhadap Pencairan Dana |

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah didasarkan pada penggunaan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan. Menguji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal baik *offline* di perpustakaan maupun *online* dari Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Pembahasan artikel ini berdasarkan kajian teori dan juga penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap permasalahan yang diungkapkan.

1. Pengaruh e-budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rohma (2023), menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang semakin massif yang digunakan dalam suatu organisasi dinilai dapat meningkatkan kinerja dan meminimalkan perilaku disfungsional. Penganggaran elektronik merupakan salah satu implementasi teknologi yang perlu diperhatikan dan dikembangkan. Adanya *e-budgeting* dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akutabilitas sehingga dapat mendorong kepercayaan publik. *e-budgeting* juga berpotensi meminimalkan terjadinya asimetri informasi karena dapat mendorong terjadinya penganggaran partisipatif. Ketercapaian e-budgeting sangat bergantung pada berbagai aspek dari sumberdaya manusia hingga sarana yang memadai.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pentingnya implementasi *e-budgeting* untuk meminimalkan potensi konflik keagenan yang ada di pemerintahan. Akan tetapi, penelitian ini terbatas hanya mempertimbangkan ranah sistem dan teknologi informasi dari sisi penganggaran yaitu *e-budgeting*.

Rahma, A.N. & Rani, U. (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *e-budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta didukung melalui penerapan layanan website diantaranya e-budget.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id. Dimana website tersebut sudah menginformasikan anggaran pemerintah yang telah terealisasikan maupun yang belum direalisasikan. Website tersebut memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang unggul pelaksanaan *e-budgeting* tidak akan berjalan dengan lancar. Pemerintah Kota Surakarta memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunitas sektoral dan *stakeholders* lainnya dalam Musrenbang dan Diskusi Kelompok Terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses yang berlangsung mampu mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kota Surakarta sekaligus sebagai upaya mewujudkan *good governance*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lestari, N. & Purnawati, I. (2022) menjelaskan Implementasi sistem *e-budgeting* di SKPD Kabupaten Karangasem yang ditinjau melalui model CIPP memiliki temuan sebagai berikut:

a. Evaluasi konteks (*context*): pelaksanaan e-budgeting diharapkan bisa mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengelola keuangan publik sehingga bisa bekerja dengan baik dan efektif;

b. Evaluasi masukan (*input*): penggunaan infrasturktur teknologi informasi berupa sarana dan prasarana yang ada sudah baik dan memadai akan tetapi masih memiliki kelemahan terkait dengan kendala jaringan internet yang belum stabil;

c. Evaluasi proses (*process*): penggunaan sistem *e-budgeting* sudah dilaksanakan kurang lebih dari tahun 2015, yang tentunya memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan public;

d. Evaluasi produk (*product*) sistem *e-budgeting* dapat mempermudah dan memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan publik sehingga harapan dari diimplementasikannya sistem tersebut bisa terpenuhi walaupun belum maksimal.

Transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem sudah terlihat, walaupun belum optimal secara keseluruhan yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Kerangka hukum yang digunakan terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan publik yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar SKPD di Kabupaten Karangasem untuk melakukatransparansi pengelolaan keuangan;

b. Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran di SKPD Kabupaten Karangasem masih belum optimal;

c. Audit dilakukan di SKPD Kabupaten Karangasem biasa dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Irda) atau bahkan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab agar penggunaan anggaran bisa terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku;

d. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran belum terlihat jelas dalam implementasi pengelolaan keuangan publik;

Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem belum berjalan secara optimal, hal tersebut dipaparkan lebih rinci sebagai berikut:

a. Sistem *e-budgeting* digunakan agar terciptanya cara kerja yang efektif dan efisien;

b. Pengawasan pengelolaan keuangan publik dilakukan dengan pelaksanaan audit oleh pihak terkait;

c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan sebagai bentuk syarat audit yang dilakukan oleh pihak terkait;

d. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik masih belum terlihat secara signifikan.

Implementasi *e-budgeting* memberikan dampak terhadap transparansi dan akuntabilitan di lingkungan SKPD Kabupaten Karangasem, walaupun tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik masih belum berjalan optimal karena factor peranan masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik.

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap Pengelolaan Keuangan

Gultom, C. & Harahap, S. (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hasil evaluasi SAKTI terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan model HOT-Fit, menunjukkan bahwa sistem telah berjalan dengan cukup efektif. Walaupun di awal implementasi, fungsi sistem masih belum siap sepenuhnya, namun sikap responsif dari pengelola SAKTI mampu memberikan kepuasan kepada pengguna. Perbaikan dan pengembangan sistem dilakukan pada tahun berjalan dan disesuaikan agar dapat mengakomodir kebutuhan satuan kerja. Selain itu, organisasi yang memberikan dukungan serta lingkungan kerja yang kondusif membuat proses adaptasi lebih mudah sehingga penerapan SAKTI dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, aspek manusia, organisasi dan teknologi terkait satu sama lain dan mempengaruhi proses implementasi sebuah sistem baru.

SAKTI telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan secara umum, dan penyusunan laporan keuangan secara khusus. Namun, SAKTI masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan disempurnakan agar lebih baik. Demi meningkatkan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola sistem diharapkan dapat memberikan keleluasan kepada pengguna untuk mengolah data. Misalnya adalah penyediaan raw data transaksi keuangan, sehingga pengguna dapat melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, terkait dengan pengunduhan buku besar. Efisiensi dapat ditingkatkan ketika pengguna dapat Kembali mengunduh buku besar secara keseluruhan akun, bukan satu per satu. SAKTI merupakan aplikasi berbasis web, dimana penggunaannya tergantung kepada koneksi internet. Pengelola SAKTI perlu memikirkan terkait dengan peningkatan bandwith. Dengan demikian, diharapkan kecepatan respon pengguna meningkat dan antisipasi terhadap lonjakan akses sistem pada periode tertentu dilakukan. Tidak hanya pendampingan atau workshop, Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus bagi para operator modul SAKTI maupun penyusun laporan keuangan, untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan pengguna terhadap SAKTI.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelia MB, Armay & Astuti, C. (2024) menguji pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel. Data diperoleh dari angket/kuesioner yang disebarkan melalui google form kepada Staf PPK sesuai SK Persekjen terbaru di Lingkungan Sekretariat Jenederal DPR RI. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Uji Korelasi Data Variabel Independen terhadap Variabel Dependen menggunakan Aplikasi SPSS26. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dijelaskan bahwa sistem yang semakin baik maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM) theory* bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi informasi yang baik dan sesuai dengan PMK No 171/PMK.05/2021tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dalam akuntansi publik di sektor pemerintahan dapatmeningkatkan kinerja sehingga dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadi cepatdan akurat. Pelaksanaan SAKTI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana yang tertuang dalam peraturan didukung oleh pengelolaan monitoring data dan transaksi SAKTI secara elektronik. SAKTI merupakan sistem aplikasi keuangan yang memiliki andil dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. *Single Entry Point* (SEP) pada SAKTI menjelaskan bahwa aplikasi SAKTI terintegrasi dan hanya melakukan satu kali input apabila dibutuhkan pada modul yang berbeda sehingga lebih efektif. Fitur lain yang dimiliki yaitu validasi transaksi, pencatatan jurnal secara realtime, laporan periodik dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Penggunaan Aplikasi SAKTI pada pelaksanaan penusunan laporan keuangan sangat bermanfaat dan membantu terhadap akuntansi pemerintah sehingga memudahkan dalam proses penyusunannya. Hal tersebut selain karena adanya *single entry* point yang dapat meminimalisir kesalahan input serta integrasi data antar modul, SAKTI mampu menghasilkan data secara real time dan dapat secara otomatis menghasilkan komponen pelaporan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan pada setiap periode pelaporan keuangan pemerintah.

Adapun proses penyusunan oleh Aplikasi SAKTI dilakukan secara elektronik dengan data yang terintegrasi dan meminimalisir adanya *human error*. Terpusatnya database SAKTI/*multi-user* oleh unit pengelolaan yaitu Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara system dan Kementerian/ Lembaga selaku pengguna akan mampu memudahkan para staf PPK bekerja dimanapun berada meskipun tetap menggunakan hak ases pengguna sesuai kewenangannya termasuk dalam verifikasi transaksi, yaitu staf PPK. Staf PPK tidak serta merta bekerja, namun ia bertanggungjawab atas pekerjaanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga dapat dipertanggungjawabkan termasuk pengaruh terhadap kualitas laporan keuangannya.

Kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimana kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rinna, dkk. (2024) menggunakan metode penelitian *causal explanatory* dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh dari variabel implementasi SAKTI terhadap efektivitas, kinerja pengguna dan dampak pada kualitas laporan keuangan pada Balai Guru Penggerak di Indonesia Timur dengan melakukan Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Model Struktural (*inner model*), dan Uji Hipotesis memberikan hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi SAKTI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tinggi rendahnya implementasi SAKTI tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Implementasi SAKTI merupakan salah satu faktor yang dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Semakin baik sistem informasi keuangan, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun dalam penelitian ini penguatan implementasi SAKTI tidak dapat menjamin kualitas laporan keuangan menjadi semakin baik.

1. Pengaruh Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap Pengelolaan Keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar, A. & Hadi, M. (2022) menunjukan bahwa:

1. Proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak baik laporan keuangan sebagai satuan kerja pada sistem aplikasi SAKTI maupun laporan keuangan sebagai kuasa BUN pada sistem aplikasi SPAN sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Proses bisnis GLP SAKTI maupun SPAN yang dijalankan di KPPN Pontianak sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kendala utama dan sering terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak baik pada sistem aplikasi SAKTI dan SPAN adalah sistem yang mengalami *lagging*. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang diproses di setiap harinya, disamping itu terdapat sarana serta prasarana pendukung yang digunakan belum memadai. Kendala lainnya adalah pada sistem aplikasi SAKTI biasanya dilakukan perbaikan/*maintenance* yang mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat.

**Kerangka Konseptual**

Kerangka berpikir yang dihasilkan dari rumusan masalah, kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan, adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual

*e-budgeting*

Pengelolaan Keuangan

SAKTI

SPAN

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, *e-budgeting*, SAKTI, dan SPAN mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan, selain ketiga variable tersebut, pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh beberapa variable lain, diantaranya :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (Adelia MB, Armay & Astuti, C. 2024);
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Adelia MB, Armay & Astuti, C. 2024);

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

 Hasil dari *literature review* yang dilakukan berdasarkan teori, artikel dan/atau penelitian terdahulu yang relevan, serta pembahasan, dapat dirumuskan hipotesis untuk penelitian selanjutnya ialah :

1. *e-budgeting* mempengaruhi Pengelolaan Keuangan;
2. SAKTI mempengaruhi Pengelolaan Keuangan;
3. SPAN mempengaruhi Pengelolaan Keuangan.

**Saran**

 Artikel ini memperlihatkan bagaimana pengaruh *e-budgeting*, SAKTI, dan SPAN terhadap pengelolaan keuangan. Tetapi perlu dicermati bahwa artikel ini memiliki keterbatasan hanya berdasarkan *literatur review* dan penelitian yang memiliki perbedaan waktu ataupun lokasi. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh dengan waktu dan lokasi yang sama agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih dalam dan akurat. Selain itu, untuk kajian selanjutnya perlu mencari faktor-faktor atau variabel *e-government* lainnya yang mempengaruhi pengelolaan keuangan.

**Daftar Rujukan**

Adelia MB, Armay & Astuti, C. (2024). Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. JRIME: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi Vol.2, No.2 April 2024.

Aminudin, N., & Putra, D. A. D. (2014). Langkah–Langkah Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Pringsewu. Jurnal Tam (Technology Acceptance Model), 3.

Amtiran, P.Y. dan Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal Of management* (SME’s) Vol. 12, No.2, 2020, p203-214.

Anwar, A. & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi SAKTI dan SPAN Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Jurnal Informatika Volume 1 No. 2 September 2022.

Handiwidjojo, W., & Oetomo, B. S. D. (2009). Integrasi Basis Data Syarat Mutlak Pembangunan Sistem Informasi EGovernment. Seminar Nasional Informatika 2009 (Semnasif 2009), 222–227.

Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi EGovernment Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. 10(1).

Kuntadi, Cris. (2022). Audit Keuangan Negara. Jakarta: Salemba Empat.

Lestari, N. & Purnawati, I. (2022). Analisis Implementasi *e-budgeting* Menggunakan Model CIPP (C*ontext, Input, Process, and Product*) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di SKPD Kabupaten Karangasem.

Loina, Lalolo Krina P. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Nur, E. (2014). Penerapan E-Goverment Publik Pada Setiap SKPD berbasis Pelayanan di Kota Palu. Penelitian Komunaikasi Dan Opini Publik, 18(3), 265–280. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/331/267>.

Pambudi, K.H., & Adam, H. (2018). Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Kenguangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan *Delone And Mclean Informasi System Success Model*. *Doctoral Dissertation*, Universitas Brawijaya).

Rahma, AN. & Rani, U. (2022). Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi Kompetif (2023).

Rinna, dkk. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Terhadap Efektivitas, Kinerja Pengguna Dan Dampak Pada Kualitas Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak Indonesia Timur. Jurnal Kendali Akuntansi Volume.2, No.1 Januari 2024.

Rohma, Frida Fanani. (2023). Urgensi Implementasi Pengganggaran Elektronik (*E-Budgeting*) Pada Sektor Pemerintahan. Jurnal Akuntansi Publik Volume 3, Nomor 1, Juli 2023.

Suaedi, F & Wardiyanto, B. (2010). Revitalisasi Administrasi Negara (reformasi Birokrasi dan E-Governance). Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sufianti, E. (2007). Aplikasi *E-Government* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 4(4), 3.

Teşu, M. D. (2012). *Developing E-Government For Better Public Services Within European Union. Theoretical And Empirical Researches In Urban Management*, 7(2).

Wibawa, Samodera. (2009). Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wicaksono, F. (2018). Dilema Implementasi EGoverment : Analisis Partisipasi Masyarakat– Ferri Wicaksono. 2(3), 227–236.